

---

## Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Periode 2019-2021

Hafizatul Latipah<sup>1</sup>, Henny Septiana Amalia<sup>2\*</sup>, Nurul Hayati<sup>3</sup>, Antung Noor Asiah<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3</sup> STIE Indonesia Banjarmasin, Indonesia

\*) Correspondent Author: [henny@stiei-kayutangi-bjm.ac.id](mailto:henny@stiei-kayutangi-bjm.ac.id)

---

### Abstract

*This study aims to determine and analyze the financial performance of Anjir Muara District, Barito Kuala Regency when viewed from the Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Activity Ratio, and Growth Ratio. The data used is in the form of the 2019-2021 APBD Realization Report. The results showed that the financial performance of the local government of Anjir Muara District, Barito Kuala Regency based on the Independence Ratio for 3 (three) years (2019-2021) was in the interval of 0% -25% with an instructive relationship pattern, in 2019 the percentage is 1.85%, in 2020 it is 0.78%, and in 2021 it is 0.82%. The Effectiveness Ratio of the financial performance of the local government of Anjir Muara District has been very effective, in 2019 the percentage was 222.39%, in 2020 it was 115.11%, and in 2021 it was 105.57%. Regional financial Efficiency Ratios can be said to be less efficient because the average percentage is 100%. The Activity Ratio is known that in 2019 the percentage was 61.28%, in 2020 it was 100.80%, and in 2021 it was 85,61%. The Growth Ratio of PAD in Anjir Muara District in 2019 was 120.19%, in 2020 it was -40.84%, and in 2021 it was -8.29%.*

**Keywords:** Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Activity Ratio, Growth Ratio

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala jika dilihat dari Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan. Data yang digunakan berupa Laporan Realisasi APBD tahun 2019-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Rasio Kemandirian adalah selama 3 (tiga) tahun (2019-2021) berada dalam interval 0%-25% dengan pola hubungan yang instruktif, pada tahun 2019 persentasenya sebesar 1,85%, tahun 2020 sebesar 0,78%, dan pada tahun 2021 sebesar 0,82%. Rasio Efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah Kecamatan Anjir Muara sudah sangat efektif, pada tahun 2019 persentasenya sebesar 222,39%, tahun 2020 sebesar 115,11%, dan tahun 2021 sebesar 105,57%. Rasio Efisiensi keuangan daerah dapat dikatakan kurang efisien karena rata-rata persentasenya sebesar 100%. Rasio Aktivitas diketahui bahwa pada tahun 2019 persentasenya sebesar 61,28%, tahun 2020 sebesar 100,80%, dan tahun 2021 sebesar 85,61%. Rasio Pertumbuhan PAD Kecamatan Anjir Muara pada tahun 2019 adalah 120,19%, tahun 2020 sebesar - 40,84%, dan pada tahun 2021 sebesar - 8,29%.

**Keywords:** Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan

---

## 1. Pendahuluan

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Bagian yang termasuk kedalam pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 salah satu bagian dari perangkat daerah adalah kecamatan. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan. Kecamatan Anjir Muara merupakan kecamatan dengan akses yang baik dan posisi yang strategis, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi yang menjadi daya tarik penduduk untuk berdomisili di wilayah Anjir Muara. Pola pertumbuhan ekonomi di wilayah Anjir Muara ini baik secara alami dan terencana diikuti dengan perkembangan kegiatan mata pencaharian penduduk lokal yaitu perdagangan dan bertani.

Permasalahan yang dihadapi oleh pihak Kecamatan Anjir Muara yaitu permasalahan koordinasi antar SKPD dan para pejabat terkait di kecamatan merupakan hal yang relatif sulit untuk dilaksanakan, khususnya kewenangan pengelolaan anggaran dan program-program pemerintah yang masuk ke Desa atau kecamatan yaitu belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan, belum terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur secara maksimal, belum optimalnya penguatan kapasitas pemerintah desa dan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, juga peran serta masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Masalah dalam pengelolaan keuangan bisa saja terjadi baik secara teknis ataupun pemanfaatan dana yang diterima. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Beberapa aspek pasti akan berkembang jika pengelolaan keuangannya dilakukan sesuai dengan standar dan undang-undang yang ada. Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran kinerja merupakan manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik (*feed back*) sehingga upaya perbaikan secara terus-menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang (Patarai, 2018).

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu: pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2018: 151). Analisis kinerja keuangan daerah pada Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala adalah proses penilaian mengenai pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dalam bidang keuangan dalam kurun waktu tahun 2019-2021.

## 2. Tinjauan Teori

### Kinerja keuangan

Pada hakekatnya laporan keuangan suatu perusahaan menjadi suatu elemen penting untuk mengetahui kinerja keuangan. Dari laporan keuangan dapat diperoleh informasi keadaan finansial perusahaan pada periode tertentu. Dimana untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dalam pengambilan keputusan perusahaan diperlukan informasi yang salah satunya di dapat dari laporan keuangan (Daniah, 2022). Keberhasilan sebuah entitas dicerminkan oleh tingkat laba yang dapat diperolehnya serta tercermin juga oleh semakin membaiknya kinerja sebuah entitas, Kinerja keuangan dapat terus mengalami peningkatan jika entitas secara terus menerus melakukan perbaikan (Annissa, 2022).

Pengertian kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Bastian, 2005:274 dalam Patarai, 2018).

### Kinerja keuangan pemerintah daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pusat. Pemerintah daerah juga memiliki fleksibilitas dalam menggunakan dananya sesuai dengan aturan yang berlaku (Syamsi, 1986 dalam Adhiantoko, 2013).

## Pengukuran kinerja keuangan

Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah digunakan dalam menilai kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauhmana aktifitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah, melihat kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

## Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan Negara. Oleh karena itu, dengan merujuk pada pengertian Keuangan Negara dalam UU No.17 Tahun 2003, maka pengertian Keuangan Daerah dapat didefinisikan yaitu Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

## APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan beban yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran (Halim dan Kusufi, 2018:33). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan.

## Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun (Mahmudi, 2010). Berikut rumus yang digunakan dalam analisis rasio keuangan pada APBD:

### 1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal (Patarai, 2018). Berikut rumus rasio kemandirian:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

**Tabel 1. Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah**

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim, 2002 dalam Patarai, 2018

### 2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Patarai, 2018).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 2. Kriteria Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah**

Persentase kinerja keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber: Halim (2007:234)

### 3. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara

besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik (Patarai, 2018). Rumus rasio efisiensi keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 3. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan**

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% ke atas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Halim (2007:234)

#### 4. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana Pemda/Pemkot memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi/pembangunan yang digunakan menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Patarai, 2018).

$$\text{Rasio Aktivitas} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

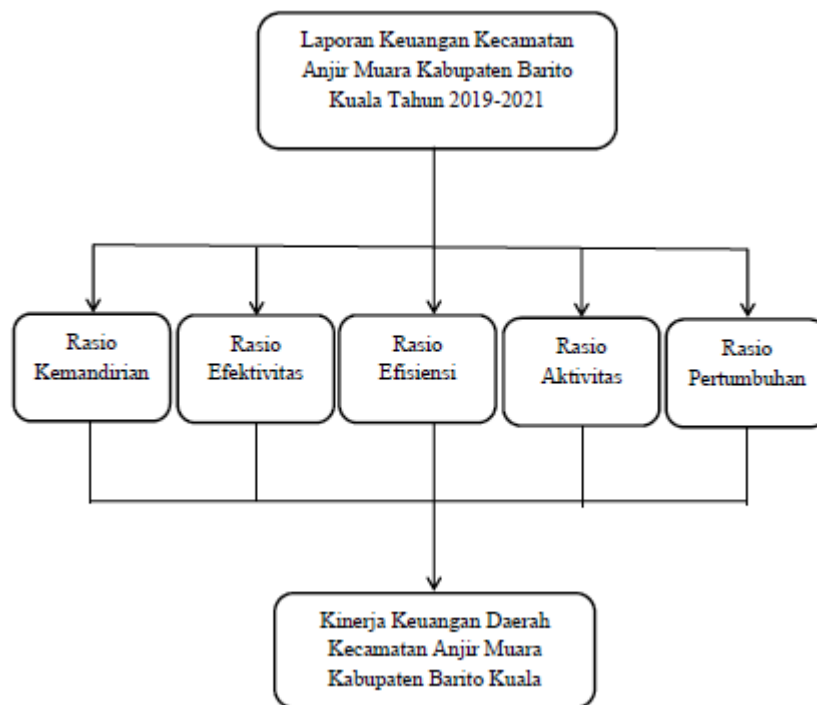
#### 5. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah atau pemerintah kota dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya (Patarai, 2018). Rasio pertumbuhan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PADt1} - \text{PADt0}}{\text{PADt0}} \times 100\%$$

### Kerangka Pemikiran

Berikut kerangka pemikiran yang disajikan peneliti dalam bentuk Gambar 1.



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**  
Sumber: Data diolah, 2022

### 3. Metode Penelitian

penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan teknik dokumentasi. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menganalisis data, yaitu:

1. Mengumpulkan data berupa Laporan Realisasi APBD pada kantor Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala.
2. Melakukan perhitungan analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan terhadap data realisasi anggaran pada tahun 2019-2021.
3. Melakukan analisis atas hasil perhitungan tersebut.
4. Memberikan jawaban terhadap masalah yang timbul dalam penulisan penelitian.
5. Mendapatkan kesimpulan mengenai kinerja keuangan daerah dari seluruh pembahasan yang dilakukan oleh peneliti.

#### 4. Analisis dan Pembahasan

##### Rasio Kemandirian

**Tabel 4. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Kecamatan Anjir Muara Tahun 2019-2021**

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	RKKD (%)	Pola Hubungan
2019	15.567.450	837.826.371	1,85	Instruktif
2020	9.209.000	1.181.327.652	0,78	Instruktif
2021	8.445.500	1.026.629.253	0,82	Instruktif

Sumber: Data diolah (2023)

Menurut uraian dari hasil perhitungan pada tabel 4. di atas menunjukkan bahwa PAD Kecamatan Anjir Muara dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan, kontribusi PAD terhadap total pendapatan APBD masih kecil dibandingkan dengan jumlah pendapatan yang bersumber dari bantuan pemerintah provinsi/pusat. PAD di Kecamatan Anjir Muara berdasarkan Perbup No 105 Tahun 2021 Pasal 63 ayat 2 hanya berasal dari Retribusi Daerah berupa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, pada tahun 2019 PAD Kecamatan Anjir Muara sebesar Rp 15.567.450, mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp 9.209.000, dan tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi Rp 8.445.500. Pendapatan Transfer merupakan dana yang diterima oleh pemerintah daerah Kecamatan Anjir Muara melalui DAU (Dana Alokasi Umum) dari pemerintah pusat. Pada laporan keuangan yang diterima dari Kecamatan Anjir Muara, Pendapatan Transfer yaitu Belanja Daerah yang dikurangkan dengan PAD, tahun 2019 Pendapatan Transfer sebesar Rp 837.826.371, kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi Rp 1.181.327.652, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp 1.026.629.253. Terjadi peningkatan Pendapatan Transfer yang besar pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan karena pandemi *covid-19*, sehingga keperluan pemerintah daerah bertambah dan berfokus dalam bidang kesehatan. Maka dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian keuangan daerah selama 3 (tiga) tahun (2019-2021) pada Kecamatan Anjir Muara masih sangat rendah serta mengalami penurunan dan kenaikan. Nilai persentase Rasio Kemandirian selama 3 (tiga) tahun tersebut berada dalam interval 0%-25% dan mengalami penurunan dan kenaikan pada setiap tahun tersebut, pada tahun 2019 persentasenya sebesar 1,85%, tahun 2020 sebesar 0,78%, dan pada tahun 2021 sebesar 0,82%. Dapat dinyatakan bahwa kemampuan keuangan Kecamatan Anjir Muara tergolong sangat rendah dengan pola hubungan yang instruktif, yaitu peranan pemerintah provinsi/pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah itu



sendiri.

## Rasio Efektivitas

**Tabel 5. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Kecamatan Anjir Muara Tahun 2019-2021**

Tahun Anggaran	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2019	7.000.000	15.567.450	222,39	Sangat Efektif
2020	8.000.000	9.209.000	115,11	Sangat Efektif
2021	8.000.000	8.445.500	105,57	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah (2023)

PAD di Kecamatan Anjir Muara berdasarkan Perbup No 105 Tahun 2021 Pasal 63 ayat 2 hanya berasal dari Retribusi Daerah berupa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, pada tahun 2019 target PAD sebesar Rp 7.000.000, kemudian pada tahun 2020 Target PAD dinaikkan menjadi Rp 8.000.000, dan pada tahun 2021 Target PAD berada pada nilai yang tetap seperti tahun sebelumnya sebesar Rp 8.000.000. Realisasi PAD Kecamatan Anjir Muara dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan disetiap tahunnya. Penurunan Realisasi PAD yang cukup besar pada tahun 2020 dan 2021 dikarenakan pandemi *covid-19* yang menyebabkan ekonomi masyarakat melemah, sehingga berpengaruh juga terhadap penurunan PAD. Pada tahun 2019 PAD Kecamatan Anjir Muara sebesar Rp 15.567.450, mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 9.209.000, kemudian pada tahun 2021 kembali terjadi penurunan menjadi Rp 8.445.500.

Efektivitas kinerja keuangan Kecamatan Anjir Muara selama 3 (tiga) tahun (2019-2021) tersebut sudah sangat efektif karena rata-rata efektivitasnya mencapai di atas 100% yaitu 147,69%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kecamatan Anjir Muara mampu merealisasikan PAD yang direncanakan. Namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, pemerintah daerah harus terus mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah.

## Rasio Efisiensi

**Tabel 6. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Kecamatan Anjir Muara Tahun 2019-2021**

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
----------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------	----------

2019	853.393.821	853.393.821	100	Kurang Efisien
2020	1.190.536.652	1.190.536.652	100	Kurang Efisien
2021	1.035.074.753	1.035.074.753	100	Kurang Efisien

Sumber: Data diolah (2023)

Belanja Daerah pada Kecamatan Anjir Muara berupa Belanja Operasi dan Belanja Modal, Realisasi Belanja Daerah pada tahun 2019 sebesar Rp 853.393.821, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi Rp 1.190.536.652 dan pada tahun 2021 total Realisasi Belanja Daerah turun menjadi Rp 1.035.074.753. Pendapatan Daerah Kecamatan Anjir Muara berasal dari PAD dan Pendapatan Transfer, pada tahun 2019 Realisasi Pendapatan Daerah Kecamatan Anjir Muara sebesar Rp 853.393.821, pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup besar mencapai Rp 1.190.536.652, dan Realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2021 terjadi penurunan kembali menjadi Rp 1.035.074.753.

Maka berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 6. dapat diketahui bahwa efisiensi keuangan daerah Kecamatan Anjir Muara selama tiga tahun (2019-2021) tersebut masih kurang efisien karena rata-rata persentasenya sebesar 100%.

## Rasio Aktivitas

**Tabel 7. Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas Kecamatan Anjir Muara Tahun 2019-2021**

Tahun Anggaran	Total Belanja Rutin (Rp)	Total APBD (Rp)	Rasio Aktivitas (%)
2019	589.134.821	961.288.890	61,28
2020	1.158.676.652	1.149.567.930	100,80
2021	922.811.153	1.077.883.988	85,61

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 7. di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 Total Belanja Rutin Kecamatan Anjir Muara sebesar Rp 589.134.821, tahun 2020 naik menjadi Rp 1.158.676.652, dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi Rp 922.811.153, Belanja Rutin sama dengan Belanja Operasi, Belanja Rutin yaitu pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintah. Belanja Rutin mengalami kenaikan yang besar diikuti juga APBD yang meningkat pada tahun 2020 disebabkan karena pandemi *covid-19*, sehingga keperluan pemerintah daerah bertambah dan

berfokus dalam bidang kesehatan. Pada tahun 2019 total APBD Kecamatan Anjir Muara sebesar Rp 961.288.890, mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi Rp 1.149.567.930, kemudian mengalami penurunan menjadi Rp 1.077.883.988.

Pada tahun 2019 persentase aktivitas Belanja Rutin Kecamatan Anjir Muara sebesar 61,28%. Pada tahun 2020 naik menjadi 100,80%, peningkatan persentase yang melebihi 100% disebabkan karena nilai Belanja Rutin lebih tinggi dari nilai APBD, sehingga untuk menutupi kekurangan dana Belanja Rutin maka pemerintah daerah menerima bantuan pemerintah provinsi/pusat. Persentase Belanja Rutin pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 85,61%.

## Rasio Pertumbuhan

**Tabel 8. Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kecamatan Anjir Muara Tahun 2019-2021**

Tahun Anggaran	PAD (Rp)	Rasio Pertumbuhan (%)
2019	15.567.450	120,19
2020	9.209.000	- 40,84
2021	8.445.500	- 8,29

Sumber: Data diolah (2023)

Pertumbuhan PAD Kecamatan Anjir Muara dari tahun 2019-2021 selalu mengalami penurunan. Penurunan Realisasi PAD yang cukup besar pada tahun 2020 dan 2021 dikarenakan pandemi *covid-19* yang menyebabkan ekonomi masyarakat melemah, sehingga berpengaruh juga terhadap penurunan PAD. Persentase dari pertumbuhan PAD pada tahun 2019 sebesar 120,19%, tetapi mengalami penurunan yang sangat besar pada tahun 2020 dengan persentase negatif menjadi – 40,84%, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi – 8,29%.

Menurut uraian dan hasil perhitungan dari tabel 8. di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD Kecamatan Anjir Muara dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan. Diharapkan Pemerintah Daerah Kecamatan Anjir Muara dapat lebih mampu mengelola Pendapatan Asli Daerah agar tidak terjadi penurunan pada periode berikutnya dengan cara memberikan sanksi yang tegas agar masyarakat memenuhi kewajibannya untuk membuat surat permohonan IMB.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan Kecamatan Anjir Muara jika dilihat dari Rasio Kemandirian tergolong sangat rendah dengan pola hubungan yang instruktif, karena nilai persentase Rasio Kemandirian selama 3 (tiga) tahun (2019-2021) berada dalam interval 0%-25%.
2. Efektivitas kinerja keuangan Kecamatan Anjir Muara dari tahun 2019-2021 berjalan sangat efektif karena rata-rata efektivitasnya mencapai di atas 100% yaitu 147,69%.
3. Kinerja keuangan Kecamatan Anjir Muara jika dilihat dari Rasio Efisiensi dapat diketahui bahwa efisiensi keuangan daerah Kecamatan Anjir Muara selama tiga tahun (2019-2021) tersebut masih kurang efisien karena rata-rata persentasenya sebesar 100%.
4. Kinerja keuangan Kecamatan Anjir Muara jika dilihat dari Rasio Aktivitas adalah bahwa aktivitas Belanja Rutin dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan dan kenaikan.
5. Jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan adalah persentase dari pertumbuhan PAD mengalami penurunan.

## 6. Saran

Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah agar tidak selalu bergantung kepada bantuan pemerintah provinsi/pusat, dapat mempertahankan kinerja keuangannya yang sudah sangat efektif dan meningkatkan efisiensinya. Pemerintah daerah Kecamatan Anjir Muara diharapkan juga dapat memperhatikan pengeluaran untuk Belanja Rutin terhadap APBD sehingga aktivitasnya dapat dinilai lebih baik lagi dan lebih mampu mengelola PAD agar tidak terjadi penurunan pada periode berikutnya dengan cara memberikan sanksi yang tegas agar masyarakat memenuhi kewajibannya untuk membuat surat permohonan IMB, sehingga pertumbuhan PAD dapat meningkat.

## Daftar Pustaka

- Adhiantoko, H. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Annissa, M. Z. 2022. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Terbuka Sektor Konsumsi Di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, vol. 23 No. 1. <https://journal-stieibjm.com/index.php/juma/article/view/15>, diakses 20 Agustus

---

2023.

- Daniah, R. 2022. Pengaruh Arus Kas terhadap Likuiditas dan Profitabilitas Pada Sektor Industri Konstruksi Milik BUMN pada Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, vol. 23 No. 1. <https://journal-stieibjm.com/index.php/juma/article/view/7>, diakses 20 Agustus 2023.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., Kusufi, M. S. 2018. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: ANDI.
- Patarai, M. I. 2018. *Kinerja Keuangan Daerah*. Makassar: De La Macca.  
(<http://eprints.ipdn.ac.id/6058/1/KINERJA%20KEUANGAN%20DAERAH.pdf>, diakses 10 November 2022).

